

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kesadaran politik warga negara menjadi faktor determinan dalam partisipasi politik masyarakat dalam pemilu, artinya sebagai hal yang berhubungan pengetahuan dan kesadaran akan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat dan kegiatan politik menjadi ukuran dan kadar seseorang terlibat dalam proses partisipasi politik. Pengalaman pemilihan umum yang berlangsung dalam beberapa dekade menunjukkan banyaknya para pemilih yang tidak memberikan suaranya. Sebagai fenomena penggambaran di atas apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah tinggi maka partisipasi politik cenderung aktif, sedangkan apabila kesadaran dan kepercayaan sangat kecil maka partisipasi politik menjadi pasif dan apatis.

Hadar menguraikan, pada tahun 1999 tingkat partisipasi dalam Pemilu tercatat 92 persen. Selanjutnya pada tahun 2004 menurun dan mencapai 84,1 persen dan akhirnya pada tahun 2009 hanya 71,1 persen. Bandingkan dengan pemilu di era Orba, yang hanya diikuti oleh tiga parpol PPP, Golkar, dan PDI . Angka partisipasi hampir mencapai 100 persen.

Sedangkan di era reformasi, yang ditandai dengan perombakan struktur dan pelaksanaan pemilu serta membaiknya kesadaran hak asasi manusia dan politik warga, angka partisipasi menurun secara drastis. Pada Pemilu 2009, angka partisipasi sebanyak 78 persen, sebelumnya pada 2004 sebanyak kurang lebih 88 persen. Angka partisipasi pemilu yang beragam dari satu daerah ke daerah lain menunjukkan tingkat kedewasaan demokrasi dalam konteks sosial yang berbeda-beda. Jika angka partisipasi warga di kota lebih rendah daripada di pedesaan, bukan berarti kedewasaan politik di desa lebih baik. Tapi, bisa berarti bahwa minim atau dibatasinya akses informasi di desa, sehingga tidak ada banyak pilihan bagi warga untuk tidak memilih.

Karena Pemilu adalah perwujudan kedaulatan rakyat melalui pemilu kemungkinan semua pihak bisa terakomodasi apa yang diinginkan dan yang dicita-citakan sehingga terwujud kehidupan yang lebih baik. Pemilihan umum mendatang merupakan langkah awal terbentuknya masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, memiliki kebebasan berekspresi dan berkehendak, dan mendapatkan akses terpenuhinya hak-hak mereka sebagai warga negara. Dan Pemilu juga dapat menjadi sarana demokrasi telah digunakan disebagian besar negara di dunia termasuk Indonesia. yang *notabene* memiliki masyarakat yang heterogen, maka dengan adanya pemilu, warga Negara telah melaksanakan kedaulatan rakyat sebagai perwujudan hak asasi politik rakyat. Dengan adanya pemilu maka warga Negara dapat melaksanakan pergantian pemerintahan secara aman, damai dan tertib, kemudian menjamin kesinambungan pembangunan nasional.

Menurut Sherry Arnstein, Sampai saat ini, partisipasi masyarakat dalam pemilu masih sebatas pada konsultasi, yang tentunya lebih baik dari pada era Orba, di mana partisipasi sebenarnya adalah mobilisasi dan manipulasi. Ada berbagai tingkatan kualitas partisipasi dari manipulasi, mobilisasi, dan konsultasi, sehingga hingga keterlibatan masyarakat secara seutuhnya (partisipasi sejati dalam pemilu).

Menurut Haryanto, warga Negara yang beraktifitas di daerah yang lebih kuat kohesi sosialnya dan dekat secara kultur sering menjadi hambatan bagi warga dalam merefleksikan kebebasan hak pilihnya. Sedangkan di kota, masyarakat lebih bebas untuk mengekspresikan hak pilihnya tanpa dibebani oleh emosi dan persoalan kultur. Dengan demikian, angka partisipasi harus dimaknai secara beragam, bergantung pada konteks sosial dan budaya setempat.

Dengan begitu, angka partisipasi bisa merefleksikan beragam makna. Pertama, bentuk dari ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai politik. Meskipun orde reformasi adalah era multipartai, partai politik masih gagal dalam mengekspresikan kedaulatan rakyat. Parpol hanya menjadi alat bagi elite politik untuk memobilisasi suara rakyat guna ikut berebut kue kekuasaan. Rendahnya angka partisipasi dengan demikian bukan semata kegagalan penyelenggaraan pemilu, tapi juga kegagalan partai politik dalam mendapatkan kepercayaan rakyat.

Ada permasalahan pasti ada solusi, karenan Pemilihan umum (pemilu) merupakan kesempatan bagi para warga Negara untuk memilih pejabat-pejabat pemerintah dan memutuskan apakah yang mereka inginkan, untuk dikerjakan oleh pemerintah dan dalam dalam membuat keputusan itu warga Negara menentukan apakah yang sebenarnya yang mereka inginkan”, melalui pemilihan umum secara langsung sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih wakil wakilnya.

Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara Mulia Banurea mengungkapkan Tingkat partisipasi pemilih pada pemilu presiden dan wakil presiden 2014 di Sumatera Utara tidak mencapai target KPU Provinsi Sumatera Utara sebesar 75 persen mengikuti target nasional. "Kebetulan saya melakukan monitoring di beberapa TPS di 5 kabupaten/kota bersama kapolda, gubernur, dan Pangdam I/BB, dirinya memonitor lima kabupaten dan kota saat pemungutan suara berlangsung. Lima daerah yang dimonitor langsung tersebut, adalah Langkat, Asahan, Batu Bara, Binjai, dan Tanjung Balai. Berdasarkan pendataan sementara, tingkat partisipasi pemilih di lima daerah tersebut, berkisar 63-66 persen atau menurun jika dibandingkan dengan partisipasi pemilih dalam pemilu legislatif. "Kalau (pemilihan legislatif) dulu, partisipasinya 71 persen.

Cukup banyak pelanggaran yang dilakukan oleh para calon legislative (Caleg) Asahan," kata anggota Panwaslu Bidang Hukum, Halimatussakdiah saat berbincang dengan MedanBisnis, Jumat (11/4) di gedung Panwaslu setempat. Halimatussakdiah menyatakan dalam waktu dekat, pihaknya melakukan pleno atas semua pelanggaran yang dilakukan oleh para caleg dalam Pemilu di Asahan. Di antaranya, kasus yang ditangani adalah kasus money politik yang terjadi di daerah pemilihan (Dapil) VI.

"Untuk kasus money politik, kita masih melengkapi bukti-bukti untuk diserahkan penyidikan kepada Gakumdu," kata Halimatussakdiah. Kasus money politics tersebut, kata Halimah dilakukan pada masa tenang, dengan alasan sedekah bersama anak yatim dan orang jompo sehingga pihak Panwas lapangan yang menemukan pelanggaran tersebut sempat diberi uang untuk tutup mulut agar persoalan itu tidak dipersoalkan. "Memang anggota kita menerima uang itu, namun uang tersebut nantinya dijadikan

barang bukti. Artinya PANwaslu akan bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku," kata Halimah.

Partisipasi Dalam Pemilu merupakan aspek penting negara demokrasi, Modernisasi politik warga dinegara yang tingkat partisipasi dalam pemilu telah berjalan dengan baik, sangat baik, akan lebih selektif dalam menentukan pilihan, apalagi berkaitan dengan aspek politik dan pemerintah yang menyangkut hidup.

Dalam setiap pemilu, angka partisipasi masih dipakai sebagai indikator terpenting keberhasilan penyelenggaraan pemilihan umum. Pada masa Orde Baru, angka partisipasi warga negara dalam memilih jauh lebih tinggi dibanding pemilu era reformasi yang akan segera terlaksana untuk ketiga kalinya (2004, 2009, dan 2014).

Penyelenggaraan Pemilu selanjutnya merupakan kewajiban warga Negara untuk mensukseskan demokrasi di negeri ini" untuk itu perlu dilakukan riset terkait persoalan pemilu, riset dilakukan langsung. Dengan mengumpulkan data pemilu di Kabupaten Asahan.

Asahan Suara Indonesia-News.com, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Selenggarakan Sosialisasi calon perseorangan dan calon yang di usung parpol atau gabungan parpol pada pemilihan umum (pemilu) Bupati dan wakil bupati Kabupaten Asahan tahun 2015. Acara yang diadakan di Hotel Marina Kisaran tersebut, salah satunya sosialisasikan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015, tetang perubahan atas Undang-undang No.1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No i tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Wali kota menjadi Undang-undang. Ketua KPU Asahan Darwis Sianpar Ketua KPU Aahan dalam acara tersebut juga mengumumkan beberapa persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2015 melalui jalur perseorangan.

Beberpa diantara persyaratan yang disampaikan, berdasarkan pengumuman KPU Asahan No.760/KPU-KAB/002-434775/V/2015 tanggal 8 Mei 20015 syarat minimal dan jumlah sebaran dunkungan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan wakil bupati asahan 2015 dengan persyaratan : jumlah dukungan sekurang kurangnya 7.5 persen dari jumlah penduduk 770.4407 juta jiwa ,7%x770.4407 = 57.783 jiwa. Dengan

jumlah lebih 50% jiwa lebih besar dari 25 kecamatan x 50% = 12.5 dibulatkan menjadi 13 kecamatan. "Bagi calon peserta dapat melihat persyaratan yang telah diumumkan KPU Kabupaten Asahan Jl. Sisingamangaraja no. 311 Kisaran. Berkas syarat peserta jalur perseorangan diserahkan langsung ke KPU Kabupaten Asahan pada tanggal 11-15 Juni 2015," Kata Darwis Sianpar.

Ketua KPU Asahan Darwis menambahkan, calon yang diusung partai politik (parpol) adalah partai yang mempunyai Kursi di legislatif Asahan. Turut hadir dalam acara tersebut, partai politik yang mempunyai kursi di DPRD Asahan, Polres, Dandim, Jajaran Pemkab Asahan Serta PPK. Dalam kegiatan tersebut juga dibuka sesi tanya jawab seputar Pemilihan Bupati dan wakil bupati Asahan.

Dalam setiap pelaksanaan pemilu, data penduduk pemilih potensial pemilu (DP4) selalu menjadi masalah. Sebab, data tersebut selalu tidak akurat dan tidak ada pemecahannya. Menurut pengamat pemilu dari Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Didik Supriyanto, terdapat empat sumber masalah dalam penyusunan DP4. Yakni, data, mekanisme atau prosedur, sosialisasi, dan anggaran. Seharusnya persoalan klasik itu dijadikan pelajaran untuk pelaksanaan pemilu 2014. "Sumber-sumber masalah tersebut mestinya dapat di jadikan pembelajaran untuk (KPU sekarang) berubah lebih baik," ucapnya saat mengisi acara pada Peluncuran Program Audit dan Monitoring daftar pemilih yang digelar Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi Sosial (LP3ES) di hotel Akmani, Jakarta Pusat.

Didik mengamati dari pemilu ke pemilu selama ini, masih belum ada perubahan yang signifikan. Meski demikian, ia mengapresiasi upaya KPU yang telah melakukan beberapa inovasi. Ada perubahan yang sudah mengarah lebih baik. Pertama, masa pendaftaran diperpanjang. Kedua KPU diberi hak menyandingkan data pemilu terakhir atas DP4," katanya.

Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) menengarai, akan banyak masalah yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum (KPU) kalau pemilihan kepala daerah tetap diadakan pada Desember 2015. Ketua Perludem Didik Supriyanto menyatakan, penyelenggaraan pilkada langsung serentak akhir tahun depan, tidak dapat menghindari

kemungkinan cuaca buruk sebagaimana selalu menerpa Indonesia setiap akhir tahun. “Masalah cuaca buruk tidak dipikirkan oleh para penyusun Perppu Pilkada. Masalah cuaca itu penting, karena soal alam ini tak bisa dilawan dan mesti kita siasati. Musim hujan di bulan Desember banyak banjir, longsor, cuaca buruk di darat dan udara yang membuat proses pemungutan suara terganggu,” katanya kepada wartawan di ruang media center KPU, Jakarta Pusat.

Selain itu, Didik mengungkapkan, sumber pendanaan pilkada yang masih menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk pilkada 2015 rentan dipermainkan oleh kepala daerah yang masih menjabat atau DPRD. “Berdasarkan pengalaman, banyak kepala daerah petahana atau jaringan kepala daerah yang memanfaatkan pencairan APBD, sehingga pilkada di banyak daerah mundur atau bahkan gagal. Selama pilkada serentak memakai APBD, maka selama itu juga pelaksanaannya terancam terganggu, tidak kalah penting, lanjut Didik, KPU juga harus memikirkan soal keamanan jika pilkada tetap diadakan tahun depan. Padahal, berdasar pengalaman penyelenggaraan, pilkada paling banyak menimbulkan kerusuhan dan kekerasan. Maka apa jadinya kalau pilkada dilaksanakan serentak? Kita akan kekurangan aparat keamanan, dan ini yang harus dibahas serius oleh KPU, Polri, bahkan TNI,” kata dia. Tiga persoalan pilkada langsung serentak itu, menurutnya, yang kemudian membuat Perudem merekomendasikan agar Pilkada Desember 2015 diundur ke tahun berikutnya. “Masalah lainnya, KPU tak memiliki cukup waktu untuk merencanakan dan mempersiapkan Pemilu 2015 yang baik,” pungkasnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada Desember 2015.

## **B. Rumusan masalah**

1. Bagaimana tingkat kehadiran pemilih dalam pemilihan umum 2014 di kabupaten Asahan ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kehadiran pemilih dalam pemilihan umum 2014 di Kabupaten Asahan ?

## **C. Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Umum
  - a. Menradisikan kebijakan berbasis riset atas persoalan-persoalan yang berkaitan dengan manajemen pemilu.
  - b. Bahan penyusunan kebijakan untuk meningkatkan dan memperkuat partisipasi warga dalam pemilu setelahnya.
2. Khusus
  - a. Menemukan akar masalah atas persoalan-persoalan yang terkait dengan partisipasi dalam pemilu.
  - b. Terumuskannya rekomendasi kebijakan atas permasalahan yang dihadapi dalam kaitanya dengan partisipasi dalam pemilu.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Untuk menambah pengetahuan mengenai tingkat partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Asahan.
2. Mengetahui problem apa yang mempengaruhi pemilih dalam memilih calon dari partai politik.
3. Bahan evaluasi dan solusi bagi KPU Kabupaten Asahan khususnya dalam menyusun strategi untuk mendorong peningkatan partisipasi pemilih.
4. Sebagai Bahan penyusunan kebijakan untuk meningkatkan dan memperkuat partisipasi masyarakat Kabupaten Asahan dalam pemilu berikutnya.
5. Menemukan akar masalah atas persoalan-persoalan yang terkait dengan partisipasi dalam pemilu di Kabupaten Asahan.
6. Terumuskannya rekomendasi kebijakan atas permasalahan yang dihadapi dalam kaitannya dengan partisipasi dalam pemilu.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Partisipasi Dalam Pemilu**

Partisipasi Dalam Pemilu merupakan aspek penting negara demokrasi, Modernisasi politik warga dinegara yang tingkat partisipasi dalam pemilu telah berjalan dengan baik, sangat baik, akan lebih selektif dalam menentukan pilihan, apalagi berkaitan dengan aspek politik dan pemerintah yang menyangkut hidup.

Dalam setiap pemilu, angka partisipasi masih dipakai sebagai indikator terpenting keberhasilan penyelenggaraan pemilihan umum. Pada masa Orde Baru, angka partisipasi warga negara dalam memilih jauh lebih tinggi dibanding pemilu era reformasi yang akan segera terlaksana untuk ketiga kalinya (2004, 2009, dan 2014).

Partisipasi dalam pemilu tidak hanya dilihat pada angka secara kuantitatif, tapi juga bisa dilihat keterlibatan masyarakat dalam pemilihan umum secara kualitatif. Partisipasi Politik "sekarang saksi partai politik ada pada setiap TPS pada artinya partisipasi publik sangat tinggi untuk mengawal proses pemilu".

Partisipasi dalam pemilu merupakan aktivitas/ kegiatan yang dilakukan warga negara untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dengan tujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah.

Bupati Asahan, Drs H Taufan Gama Simatupang MAP menggelar syukuran atas suksesnya pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif tahun 2014 kemarin. Syukuran digelar Kamis, (26/6) di Hotel Pesona Wisata, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan. Dalam sambutannya, Bupati Asahan menjelaskan bahwa terwujudnya pemilu yang damai dan bermartabat di wilayah Asahan tidak terlepas dari peran serta penyelenggara mulai dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga KPPS dan Pengawas Pemilu serta peran dari seluruh elemen masyarakat Asahan. " Saya ucapkan terimakasih kepada penyelenggara Pemilu dan seluruh masyarakat Asahan yang telah bersama-sama menjaga kelancaran penyelenggaraan Pemilu di Asahan, " demikian Bupati Asahan dalam acara tersebut yang dihadiri oleh ribuan orang.

Selain itu Bupati Asahan juga meminta kepada seluruh Tim Pemenangan calon Presiden dan Wakil Presiden atau para relawan, baik calon pasangan nomor 1 dan



pasangan nomor 2 harus saling menghargai dan saling menjaga keamanan sehingga pelaksanaan Pemilu yang damai dan bermartabat dapat diraih di Kabupaten Asahan. “ Mari kita satukan gerak dan langkah agar Pemilu di Asahan berjalan dengan lancar, “ cetus Taufan sembari meminta penyelenggara untuk terus dapat meningkatkan partisipasi masyarakat Kabupaten Asahan menggunakan hak pilihnya pada Pilres mendatang.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Asahan, Darwis Sianipar S.Ag memberikan apresiasi kepada Bupati Asahan yang telah menyelenggarakan syukuran terhadap suksesnya pemilu legislative kemarin di Asahan. “ Luar biasa apa yang telah dilakukan Bupati Asahan. apalagi menghadirkan seluruh penyelenggaran Pemilu, “ kata Ketua KPUD Asahan, sembari menjelaskan bahwa Pemilu Pileg kemarin pihak KPUD Asahan menerima gugatan Pemilu, namun sejumlah gugatan yang dilakukan para calon legislative telah ditolak pihak Mahkamah Konsitusi (MK).

### **1. Pengertian partisipasi politik dalam pemilu**

Partisipasi politik dalam pemilu adalah kegiatan warganegara yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan politik. Partisipasi politik dilakukan orang dalam posisinya sebagai warganegara, bukan politikus ataupun pegawai negeri dan sifat partisipasi politik ini adalah sukarela, bukan dimobilisasi oleh negara ataupun partai yang berkuasa.

Definisi partisipasi politik yang cukup senada disampaikan oleh Silvia Bolgherini. Menurut Bolgherini, partisipasi politik " *... a series of activities related to political life, aimed at influencing public decisions in a more or less direct way— legal, conventional, pacific, or contentious.*[3] Bagi Bolgherini, partisipasi politik adalah segala aktivitas yang berkaitan dengan kehidupan politik, yang ditujukan untuk memengaruhi pengambilan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung -- dengan cara legal, konvensional, damai, ataupun memaksa.

Ruang bagi partisipasi politik adalah sistem politik. Sistem politik memiliki pengaruh untuk menuai perbedaan dalam pola partisipasi politik warganegaranya. Pola partisipasi politik di negara dengan sistem politik Demokrasi Liberal tentu berbeda dengan di negara dengan sistem Komunis atau Otoritarian. Bahkan, di

negara-negara dengan sistem politik Demokrasi Liberal juga terdapat perbedaan, seperti yang ditunjukkan Oscar Garcia Luengo, dalam penelitiannya mengenai *E-Activism: New Media and Political Participation in Europe*. [4] Warganegara di negara-negara Eropa Utara (Swedia, Swiss, Denmark) cenderung lebih tinggi tingkat partisipasi politiknya ketimbang negara-negara Eropa bagian selatan (Spanyol, Italia, Portugal, dan Yunani).

Menurut Selly mersilia Sifat kodrat manusia adalah sebagai makhluk individu sekaligus sebagai makhluk sosial. Berkaitan dengan kehidupan politik manusia merupakan elemen pokok dalam melaksanakan efektifitas politik kenegaraan, baik sebagai pelaku maupun sebagai objek tujuan. Manusia sebagai makhluk politik, warga negara, baik sebagai pribadi maupun kelompok harus menunjukkan peran aktif dalam kehidupan kenegaraan.

Negara adalah suatu organisasi dan merupakan suatu sistem politik berhubungan tentang proses penentuan maupun pelaksanaan tujuan negara. Manusia sebagai insan politik sekaligus warga negara harus dapat menunjukkan partisipasinya dalam kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan efektifitas politik kenegaraan.

Sesuai dengan pengertian, fungsi dari sifat negara di atas maka manusia sebagai insan politik dituntut partisipasi politiknya di dalam mewujudkan fungsi dari negara tersebut. Partisipasi politik dari manusia sebagai insan politik dalam kehidupan bernegara dapat diwujudkan dalam bentuk seperti:

- a. Membentuk atau bergabung dalam organisasi politik atau organisasi masyarakat untuk menentukan kebijakan negara.
- b. Membentuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk mengontrol sekaligus memberikan input (masukan) dapat menentukan kebijakan pemerintah.
- c. Mendukung terselenggaranya pelaksanaan pemilu yang demokratis yang dapat menjamin hak-hak politik rakyat, seperti memilih maupun dipilih yakni memilih anggota-anggota badan perwakilan rakyat dan pejabat pemerintah

atau duduk dalam lembaga perwakilan rakyat dan menduduki jabatan pemerintahan.

- d. Membentuk kelompok-kelompok kepentingan sebagai upaya terhadap proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah

Jadi manusia sebagai insan politik bisa diartikan manusia selain sebagai makhluk individu sekaligus juga sebagai makhluk sosial selalu hidup berkelompok dengan manusia lain secara teratur, sistematis, dan memiliki tujuan yang jelas.

## 2. Bentuk-bentuk partisipasi politik

Jika mode partisipasi politik bersumber pada faktor “kebiasaan” di suatu zaman, maka bentuk partisipasi politik mengacu pada wujud nyata kegiatan politik tersebut. Samuel P. Huntington dan Joan Nelson membagi bentuk-bentuk partisipasi politik menjadi:

- a. Kegiatan Pemilihan – yaitu kegiatan pemberian suara dalam pemilihan umum, mencari dana partai, menjadi tim sukses, mencari dukungan bagi calon legislatif atau eksekutif, atau tindakan lain yang berusaha mempengaruhi hasil pemilu.
- b. Lobby – yaitu upaya perorangan atau kelompok menghubungi pimpinan politik dengan maksud mempengaruhi keputusan mereka tentang suatu isu.
- c. Kegiatan Organisasi – yaitu partisipasi individu ke dalam organisasi, baik selaku anggota maupun pemimpinnya, guna mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah.
- d. Contacting – yaitu upaya individu atau kelompok dalam membangun jaringan dengan pejabat-pejabat pemerintah guna mempengaruhi keputusan mereka, dan
- e. Tindakan Kekerasan (*violence*) – yaitu tindakan individu atau kelompok guna mempengaruhi keputusan pemerintah dengan cara menciptakan kerugian fisik manusia atau harta benda, termasuk di sini adalah huru-hara,

teror, kudeta, pembutuhan politik (assassination), revolusi dan pemberontakan.

Kelima bentuk partisipasi politik menurut Huntington dan Nelson telah menjadi bentuk klasik dalam studi partisipasi politik. Keduanya tidak membedakan apakah tindakan individu atau kelompok di tiap bentuk partisipasi politik legal atau ilegal. Sebab itu, penyuapan, ancaman, pemerasan, dan sejenisnya di tiap bentuk partisipasi politik adalah masuk ke dalam kajian ini.

Sementara itu bentuk partisipasi politik seorang tampak dalam aktivitas-aktivitas politiknya. Bentuk partisipasi politik yang paling umum dikenal adalah pemungutan suara (voting) entan untuk memilih calon wakil rakyat atau untuk memilih kepala negara.

Dalam buku pengantar sosiologi Politik, Michael Rush dan Philip Althoff mengidentifikasi bentuk-bentuk partisipasi politik sebagai berikut:

- a. Menduduki jabatan politik atau adiministarasi;
- b. Mencari jabatan politik atau administrasi;
- c. Mencari anggota aktif dalam suatu organisasi politik;
- d. Menjadi anggota pasif dalam suatu organisasi politik.
- e. Menjadi anggota aktif dalam suatu organisasi semi politik
- f. Menjadi anggtota pasif dalam suatu organisasi semi politik
- g. Paritispasi dalam rapat umum, demonstrasi, dsb
- h. Partisipasi dalam diskusi politik internal
- i. Partisipasi dalam pemungutan suara.

### **3. Tujuan Partisipasi Dalam Pemilu**

Menurut Jigan Salah satu tujuan perlunya masyarakat memiliki partisipasi politik di dalam negaranya yaitu :

- a. Untuk mempengaruhi pemilihan pejabat public
- b. Melaksanakan kewajiban sebagai warga negara yang bertanggung jawab
- c. Mewujudkan system politik yang berbasis pada perwakilan rakyat
- d. Untuk mengawasi sekaligus mengontrol setiap peraturan yang ada

- e. Mengadakan pengawasan terhadap setiap keputusan pemerintah

Adanya kondisi masyarakat yang beraneka ragam tentunya tiap-tiap warga masyarakat mempunyai tujuan hidup yang beragam pula sesuai dengan tingkat kebutuhannya, dan upaya memenuhi kebutuhan itu di refleksikan dalam bentuk kegiatan, yang tentunya kebutuhan yang berbeda akan menghasilkan kegiatan yang berbeda pula. Demikian pula dalam partisipasi politiknya tentu tujuan yang ingin dicapai antara warga satu berbeda dengan yang lain.

Menurut Davis, partisipasi politik bertujuan untuk mempengaruhi penguasa baik dalam arti memperkuat maupun dalam pengertian menekannya sehingga mereka memperhatikan atau memenuhi kepentingan pelaku partisipasi. Tujuan tersebut sangat beralasan karena sasaran partisipasi politik adalah lembaga-lembaga politik atau pemerintah yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan politik.

Sedangkan bagi pemerintah, partisipasi politik dari warga negara mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mendukung program-program pemerintah, artinya peran serta masyarakat diwujudkan untuk mendukung program politik dan pembangunan.
- b. Sebagai organisasi yang menyuarakan kepentingan masyarakat untuk masukan bagi pemerintah dalam mengarahkan dan meningkatkan pembangunan.

Artinya partisipasi politik sangatlah penting bagi masyarakat maupun pemerintah. Bagi masyarakat dapat sebagai sarana untuk memberikan masukan, kritik, dan saran terhadap pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, sedangkan bagi pemerintah partisipasi politik merupakan sebuah mekanisme pelaksanaan fungsi kontrol terhadap pemerintah dan pelaksanaan kebijakan.

#### **4. Landasan Partisipasi Dalam Pemilu**

Huntington dan Nelson mengemukakan bahwa landasan yang lazim digunakan untuk menyelenggarakan partisipasi politik adalah:

a. Kelas

Perorangan-perorangan dengan status sosial, pendapatan, pekerjaan yang serupa.

b. Kelompok

Perorangan-perorangan dari ras, agama, bahasa atau etnisitas yang sama.

c. Lingkungan

Perorangan-perorangan yang secara geografi bertempat tinggal berdekatan satu sama lain.

d. Partai

Perorangan yang mengidentifikasi diri dengan organisasi formal yang sama yang berusaha untuk meraih atau mempertahankan kontrol atas bidang-bidang eksekutif dan legislatif pemerintah.

e. Golongan

Perorangan-perorangan yang dipersatukan oleh intraksi yang terus menerus atau intens satu sama lain, dan salah satu manifestasinya adalah pengelompokan patro-klien, artinya satu golongan yang melibatkan pertukaran manfaat-manfaat secara timbal balik di antara perorangan-perorangan yang mempunyai sistem status, kekayaan dan pengaruh yang tidak sederajat.

Hermawan berpendapat bahwa yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku politik, adalah:

a. Lingkungan sosial politik tidak langsung seperti sistem politik, media masa, sistem budaya, dan lain-lain.

b. Lingkungan politik langsung yang mempengaruhi dan membentuk kepribadian aktor seperti keluarga, teman agama, kelas, dan sebagainya.

c. Struktur kepribadian yang tercermin dalam sikap individu.

- d. Faktor sosial politik langsung berupa situasi, yaitu keadaan yang mempengaruhi aktor secara langsung ketika hendak melakukan suatu kegiatan politik, seperti suasana kelompok, ancaman, dan lain-lain.

## **B. Pemilihan Umum (Pemilu)**

### **Pengertian Pemilihan Umum (Pemilu)**

Pemilihan umum (disebut Pemilu) adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik. tertentu jabatan-jabatan tersebut beraneka-ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa

Pemilu merupakan salah satu usaha untuk memengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, hubungan publik, komunikasi massa, lobi dan lain-lain kegiatan. Meskipun agitasi dan propaganda di Negara demokrasi sangat dikecam, namun dalam kampanye pemilihan umum, teknik agitasi dan teknik propaganda banyak juga dipakainya oleh para kandidat atau politikus selalu komunikator politik.

Sejak proklamasi kemerdekaan hingga tahun 2004 di Indonesia telah dilaksanakan pemilihan umum sebanyak sepuluh kali, yaitu dimulai tahun 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009. Jumlah kontestan partai politik dalam pemilihan disetiap tahunnya tidak selalu sama, kecuali pada pemilu tahun 1977 sampai 1997. Pemilu pada tahun 1955 dilangsungkan pada dua tahap sebagai berikut. Pertama, pemilu diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR. Kedua, pemilu diselenggarakan pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggara pemilihan umum dinyatakan bahwa pemilihan umum, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu hak asasi warga negara yang sangat prinsipil. Karenanya dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi adalah suatu keharusan bagi pemerintah untuk melaksanakan pemilu. Sesuai dengan asas bahwa rakyatlah yang berdaulat maka semuanya itu harus dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Adalah suatu pelanggaran suatu hak asasi apabila pemerintah tidak mengadakan pemilu atau memperlambat pemilu.

Dari pengertian di atas bahwa pemilu adalah sarana mewujudkan pola kedaulatan rakyat yang demokratis dengan cara memilih wakil-wakil rakyat, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Karena pemilu merupakan hak asasi manusia maka pemilu 2014 warga negara yang terdaftar pada daftar calon pemilih berhak memilih langsung wakil-wakilnya dan juga memilih langsung Presiden dan Wakil Presidennya.

### **Tujuan Pemilihan Umum**

Sarana politik untuk mewujudkan kehendak rakyat kepada Negara dalam system Demokrasi Pancasila adalah Pemilihan Umum (Pemilu). Rakyat sebagai pemegang kedaulatan berhak menentukan warna dan bentuk pemerintahan serta tujuan yang hendak dicapai, sesuai dengan konstitusi yang berlaku.

Selain Landasan umum dan asas, pemilihan umum juga mempunyai tujuan yang harus dicapai. Seperti yang telah kita ketahui bahwa Pemilihan umum atau pemilu digelar sebanyak satu kali dalam lima tahun untuk memilih Presiden dan wakilnya merupakan salah satu tujuan pemilihan umum yang sangat penting. Berikut ini tujuan Pemilihan Umum (Pemilu) secara umum, yaitu :

- a. Melaksanakan kedaulatan rakyat;
- b. Sebagai perwujudan hak asasi politik rakyat;
- c. Untuk memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di DPR, DPD dan DPRD, serta memilih Presiden dan Wakil Presiden;



- d. Melaksanakan pergantian personal pemerintahan secara damai, aman, dan tertib (secara konstitusional).
- e. Menjamin kesinambungan pembangunan nasional.

### **Asas Pemilihan Umum**

Berdasarkan Pasal 22 E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneisa tahun 1945, Pemilu diselenggarakan secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil.

Pengertian asas pemilu adalah :

- a. Secara langsung yaitu rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.
- b. Umum adalah semua warga negara yang memenuhi persyaratan minimal dalam usia, sudah berumur 17 tahun atau telah pernah menikah, berhak ikut memilih dalam pemilu dan warga negara yang sudah berusia 21 tahun berhak dipilih dengan tanpa ada diskriminasi (pengecualian).
- c. Bebas menjadi dasar setiap warga negara yang memilih menentukan pilihannya tanpa intimidasi dan paksaan dari siapapun/ dengan apapun. Dalam melaksanakan haknya setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai keinginan hati nurani dan kepentingannya.
- d. Rahasia  
 Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya akan diberikan.
- e. Jujur  
 Dalam penyelenggaraan pemilu seitap penyelenggara/pelaksana pemilu, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas, dan pemantau pemilu, termasuk pemilih serta semua pihak yang terlibat secara tidak

langsung harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Adil

Berarti dalam penyelenggaraan pemilu setiap pemilih dan parpol peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

### **Sistem Pemilihan Umum**

Sesuai teori demokrasi klasik pemilu adalah sebuah "Transmission of Belt" sehingga kekuasaan yg berasal dari rakyat bisa bergeser menjadi kekuasaan negara yg kemudian berubah bentuk menjadi wewenang pemerintah untuk melaksanakan pemerintahan dan memimpin rakyat. Berikut adalah pendapat beberapa para ahli tentang pemilihan umum.

Moh. Kusnardi & Harmaily Ibrahim - Pemilihan umum merupakan sebuah cara untuk memilih wakil-wakil rakyat. oleh karenanya bagi sebuah negara yang mennganggap dirinya sebagai negara demokratis, pemilihan umum itu wajib dilaksanakan dalam periode tertentu.

Bagir Manan - Pemilhan umum yang diselenggarakan dalam periode lima 5 tahun sekali adalah saat ataupun momentum memperlihatkan secara langsung dan nyata pemerintahan oleh rakyat. Ketika pemilihan umum itulah semua calon yang bermimpi duduk sebagai penyelenggara negara dan juga pemerintahan bergantung sepenuhnya pada kehendak atau keinginan rakyatnya.

Sistem Pemilihan Umum merupakan metode yang mengatur serta memungkinkan warga negara memilih/mencoblos para wakil rakyat diantara mereka sendiri. Metode berhubungan erat dengan aturan dan prosedur merubah atau mentransformasi suara ke kursi di parlemen. Mereka sendiri maksudnya adalah yang memilih ataupun yang hendak dipilih juga merupakan bagian dari sebuah entitas yang sama.

Terdapat bagian-bagian atau komponen-komponen yang merupakan sistem itu sendiri dalam melaksanakan pemilihan umum diantaranya:

- a. Sistem hak pilih
- b. Sistem pembagian daerah pemilihan.
- c. Sistem pemilihan
- d. Sistem pencalonan.

### **Sistem Pemilihan Umum di Indonesia**

Bangsa Indonesia telah menyelenggarakan pemilihan umum sejak zaman kemerdekaan. Semua pemilihan umum itu tidak diselenggarakan dalam kondisi yang vacuum, tetapi berlangsung di dalam lingkungan yang turut menentukan hasil pemilihan umum tersebut. Dari pemilu yang telah diselenggarakan juga dapat diketahui adanya usaha untuk menemukan sistem pemilihan umum yang sesuai untuk diterapkan di Indonesia.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Metode Riset/ Penelitian “Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu” di Kabupaten Asahan pemilihan sampel dalam Riset ini dilakukan dalam 5 tahap. Pada tahap pertama dipilih 3 Kecamatan secara purposive (sengaja) namun dapat mewakili wilayah barat dan timur Kabupaten Asahan, Tahap kedua adalah memilih 1 Desa dari masing-masing Kecamatan kecuali Kecamatan Kisaran Barat dan Kisaran Timur. Sampai dengan tahap ketiga, pemilihan sampelnya dilakukan di Kecamatan Kisaran Kota dengan menentukan 2 Rukun Tetangga (RT) pada setiap Kelurahan yang dilakukan oleh tim riset.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung (tatap muka) antara pencacah dengan responden dengan menggunakan kuesioner. Responden terpilih adalah warga/ DPT pada pemilu 2014 dan 2015 yang mengetahui secara persis karakteristik permasalahan pemilu ditengah masyarakat adalah mereka yang berdomisili di daerah yang dijadikan sampel.

#### **B. Fokus Penelitian**

Penentuan fokus penelitian memiliki dua tujuan yaitu, penetapan fokus akan membatasi studim jadi dalam fokus akan membatasi bidang inkuiri.Kedua, penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi criteria inklusi-eksluasi atau criteria masuk-keluar suatu informasi yang diperoleh.

Untuk mengukur tingkat partisipasi dalam pemilu, tim menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan. Tinggi atau rendahnya tingkat partisipasi warga dalam pemilu dipandang sebagai ketidak mampuan kita untuk langsung berdiskusi dengan seluruh responden dari sisi agama untuk menjalin silaturahmi, dari sisi sosial memenuhi tanggung jawab insan akademisi dan dari sisi profesionalitas pekerjaan riset ini dilakukan untuk mencari akar masalah dalam pemilu di asahan.

Di dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah partisipasi politik masyarakat (pemilih) dalam pemilu, berupa kehadiran pemilih di lokasi TPS untuk

memberikan hak suaranya pada pelaksanaan pemilu di Kabupaten Asahan. Agar dapat memberikan hasil yang lengkap maka fokus penelitian tersebut dirinci dalam unit-unit kajian sebagai berikut :

1. Tingkat kehadiran pemilih dalam pemilihan umum tahun 2014 di Kabupaten Asahan.
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kehadiran pemilih untuk Asahan.

### **C. Sumber Data Penelitian**

Sumber data utama dalam penelitian adalah keterangan warga asahan yang sudah bisa memberikan hak suaranya untuk memilih dalam pemilu, dan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

Data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat berupa sesuatu yang diketahui atau yang dianggap. Data dapat digambarkan lewat angka, symbol, dan lain-lain. Data perlu dikelompok-kelompokkan terlebih dahulu sebelum dipakai dalam proses analisis. Pengelompokan disesuaikan dengan karakteristik yang menyertainya.

Sumber data dalam penelitian ini adalah berupa jawaban responden dan data KPUD Asahan pemilu tahun 2014 .

### **D. Metode Pengumpulan Data**

Data primer adalah setiap bahan tertulis yang merupakan data hasil penelitian. Teknik dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, notulen dan lain-lain.

Sesuai dengan pengertian di atas maka data primer yang digunakan yaitu data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan partisipasi politik di Kabupaten Asahan yaitu sebagai berikut :

1. Buku Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Asahan. Dari data tersebut dapat diperoleh jumlah banyaknya warga Kabupaten Asahan yang mempunyai hak pilih.
2. Buku pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara dalam pemilihan umum tahun 2014. Dari situ dapat diperoleh data mengenai teknis pemungutan dan penghitungan suara.

Data sekunder diperoleh melalui buku-buku, dokumen negara, laporan-laporan hasil penelitian, makalah-makalah, jurnal-jurnal ilmiah, dan artikel-artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

#### E. Metode Pengolahan Data

Data yang diperoleh selanjutnya diolah dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Seleksi Data, yaitu pemeriksaan data untuk mengetahui apakah data tersebut sudah lengkap sesuai dengan keperluan penelitian.
2. Klasifikasi Data, yaitu menempatkan data sesuai dengan bidang pokok bahasan agar mudah dalam menganalisisnya.
3. Sistematika data, yaitu penyusunan data menurut sistematika yang ditetapkan dalam penelitian sehingga mempermudah dalam analisa.

#### F. Analisa Data

Tabel I. Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Asahan 2013 Sumber : BPS Kabupaten Asahan

Kecamatan	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (orang/km <sup>2</sup> )
010. B. P. Mandoge	651,00	33 512	51
020. Bandar Pulau	433,42	20 874	48
021. Aek Songsongan	117,31	16 794	143
022. Rahuning	184,27	17 831	97
030. Pulau Rakyat	250,99	32 216	128
031. Aek Kuasan	95,23	23 257	244
032. Aek Ledong	82,13	20 049	244
040. Sei Kepayang	235,30	17 437	74
041. Sei Kepayang Barat	82,92	13 052	157
042. Sei Kepayang Timur	142,80	8 765	61
050. Tanjung Balai	55,61	35 601	640
060. Simpang Empat	130,44	40 143	308

061. Teluk Dalam	96,00	17 595	183
070. Air Batu	94,60	39 913	422
071. Sei Dadap	65,72	31 429	478
080. Buntu Pane	218,28	22 985	105
081. Tinggi Raja	125,56	18 481	147
082. Setia Janji	202,66	11 682	58
090. Meranti	90,75	19 751	218
091. Pulo Bandring	99,91	28 278	283
092. Rawang Panca Arga	90,30	17 886	198
100. Air Joman	92,86	46 738	503
101. Silo Laut	89,45	20 601	230
160. Kisaran Barat	32,96	56 509	1 714
170. Kisaran Timur	38,92	70 415	1 809
<b>ASAHAN</b>	<b>3 799,39</b>	<b>681 794</b>	<b>179</b>

Tabel II. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (jiwa), 2013

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0 - 4	39 597	38 193	77 790
5 - 9	37 090	35 647	72 737
10 - 14	35 662	34 550	70 212
15 - 19	33 840	32 121	65 961
20 - 24	29 420	28 040	57 460
25 - 29	27 948	27 007	54 955
30 - 34	25 469	25 658	51 127
35 - 39	23 291	23 436	46 727
40 - 44	21 150	21 789	42 939
45 - 49	18 882	19 943	38 825
50 - 54	17 026	16 794	33 820
55 - 59	12 900	12 416	25 316
60 - 64	7 437	7 946	15 383
65+	12 625	15 917	28 542
<b>Jumlah</b>	<b>342 337</b>	<b>339 457</b>	<b>681 794</b>

Sumber : BPS Kabupaten Asahan

Tabel . Data Agregat Jumlah Penduduk di Kabupaten Asahan Tanggal 17-042015  
 Sumber : Catatan Sipil Kabupaten Asahan

Kecamatan	Penduduk Jenis Kelamin		Jumlah Penduduk (Jiwa)
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
01. Meranti	12.402	11.929	24.331
02. Air Joman	28.431	26.787	55.218
03. Tanjung Balai	21.540	20136	41.676
04. Sei Kepayang	9.590	9.298	18.888
05. Simpang Empat	23.585	22.679	45.264
06. Air Batu	22.655	21.536	44.191
07. Pulau Rakyat	18.162	17.608	35.770
08. Bandar Pulau	11.678	10.931	22.609
09. Buntu Pane	12.175	11.930	24.105
010. B. P. Mandoge	20.159	19.533	39.692
011. Aek Kuasan	13.165	12.577	25.742
012. Kisaran Barat	31.081	30.697.	61.778
013. Kisaran Timur	39.944	39.532	74.467
014. Aek Songsongan	9.129	8.877	18.006
015. Rahuning	9.799	9.429	19.228
016. Sei Dadap	18.003	16.946	34.949
017. Sei Kepayang Barat	7.417	7.057	14.474
018. Sei Kepayang Timur	4.935	4.634	9.569
019. Tinggi Raja	11.106	10.510	21.616
020. Setia Janji	7.179	6.911	14.090
021. Silo Laut	13.068	12.438	25.506
022. Rawang Panca Arga	10.575	10.171	20.746
023. Pulo Bandring	15.529	14.633	30.162
024.. Teluk Dalam	10.328	9.848	20.176
025. Aek Ledong	10.328	9.484	20.176
<b>ASAHAN</b>	<b>393.085</b>	<b>377.355</b>	<b>770.440</b>



Tabel II. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (jiwa), 2013

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0 - 4	39 597	38 193	77 790
5 - 9	37 090	35 647	72 737
10 - 14	35 662	34 550	70 212
15 - 19	33 840	32 121	65 961
20 - 24	29 420	28 040	57 460
25 - 29	27 948	27 007	54 955
30 - 34	25 469	25 658	51 127
35 - 39	23 291	23 436	46 727
40 - 44	21 150	21 789	42 939
45 - 49	18 882	19 943	38 825
50 - 54	17 026	16 794	33 820
55 - 59	12 900	12 416	25 316
60 - 64	7 437	7 946	15 383
65+	12 625	15 917	28 542
<b>Jumlah</b>	<b>342 337</b>	<b>339 457</b>	<b>681 794</b>

Sumber : BPS Kabupaten Asahan

Data yang telah diolah, dianalisis secara kuantitatif dengan teori yang digunakan, yaitu memberi arti dan menginterpretasikan setiap data yang telah diolah kemudian diuraikan secara komperhensif dan mendalam dalam bentuk uraian kalimat yang sistematis untuk kemudian ditarik kesimpulan. Selain itu dalam menjawab permasalahan pertama peneliti menggunakan analisa isi (*contain analysis*) untuk mendeskripsikan hasil pemilihan dalam 10 tahun terakhir kemudian menyusun dan mengklasifikasikannya. Terdapat tiga tahap model dalam analisis bahan hokum, yaitu :

1. Reduksi data.
2. Penyajian data.
3. Veryfikasi data.

Ketiga tahapan tersebut akan dilakukan secara simultan.

Analisa data merupakan langkah terakhir sebelum melakukan penarikan kesimpulan. Analisis bahan hukum merupakan langkah yang paling penting dalam suatu penelitian, sebab dengan analisis akan diketahui benar atau tidaknya suatu kesimpulan yang diambil.

### **Daftar Pemilih Yang Terdaftar (DPT)**

Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum pemilihan umum di kabupaten asahan :

- a. Pada pemilu asahan tahun 2009 jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) berkisar 16.04.09 .
- b. Pada pemilu asahan tahun 2010 Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah - Wakil Kepala Daerah (Pemilu Kada) berkisar 471.700 orang.
- c. Akhirnya kelemahan DPT pemilih menjadi catatan pribadi bagi penyelenggara pemilu pada waktu itu Hasil pengawasan sementara pelaksanaan tahapan Pemilu Kepala Daerah oleh Panitia Pengawas Pemilu Kepala Daerah (Panwaslu Kada) 2010, terdapat 12 daerah yang daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) Pemilu Kada kurang dari daftar pemilih tetap (DPT) pemilu terakhir yaitu Pemilu Presiden. Ke-12 daerah itu adalah Kabupaten Asahan, Kota Tebing Tinggi, Kota Pekalongan, Kabupaten Gunung Kidul, Kota Blitar, Kabupaten Kediri, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Toli-Toli, Kabupaten Maros dan Kabupaten Soppeng.
- d. Di samping itu, ada temuan sementara Panwaslu Kada juga terdapat 38 daerah yang DP4 Pemilu Kada melebihi DPT Pilpres 2009," ini menjadi proses menjelang dewasa demokrasi di negara kita, pemilu selanjutnya 2014 Jumlah pemilih Laki - Laki sejumlah 237.350 orang dan pemilih Perempuan Sejumlah 235.818 orang sehingga jumlah DPT Kab. Asahan sejumlah 437.168 orang. Jumlah pemilih ini telah melalui banyak tahapan baik itu pendaftaran oleh pantarlih, pps sampai dengan ppk. DPT Kab

Asahan ini juga tela memalui proses penyaringan untuk pemilih yang meninggal, anggota TNI/POLRI, pindah Domisili, dan dibawah umur. Sebuah kebijakan kepada Pemilih yang merasa namanya belum terdaftar dapat didaftarkan dalam daftar pemilih khusus (DPK). segera laporkan diri anda seandainya belum terdaftar ke PPS daerah tempat tinggal. Kemudian sebanyak 1.881 Tempat Pemungutan Suara (TPS) disiapkan untuk pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) 9 Juli mendatang di seluruh Kabupaten Asahan.jumlah pemilih sebanyak 489.542 orang.

- e. Untuk persiapan pemilukada serentak 2015 KPU asahan telah melakukan pemutakhiran data pemilih, (DP4 Asahan dalam table dibawah)

Kecamatan	Umur Kurang dari 17 dan Menikah	Umur diatas 90 Tahun	Pemilih Pemula	Jumlah			Total
				Disabilitas	Pria	Wanita	
AEK KUASAN	3	37	753	24	10.311	10.253	20.564
AEK LEDONG	0	54	209	13	8.428	7.851	16.279
AEK SONGSONGAN	2	7	672	8	7.233	7.148	14.381
AIR BATU	0	74	650	22	17.309	16.508	33.817
AIR JOMAN	2	133	729	29	20.951	19.757	40.708
BANDAR PASIR MANDOGÉ	0	34	661	30	15.394	14.946	30.340
BANDAR PULAU	0	26	354	9	8.804	8.191	16.995
BUNTU PANE	0	9	775	10	9.685	9.559	19.244
KOTA KISARAN BARAT	0	104	1.708	49	23.973	24.921	48.894
KOTA KISARAN TIMUR	0	121	1.318	52	30.266	31.102	61.368
MERANTI	1	34	745	17	9.752	9.673	19.425
PULAU RAKYAT	0	60	561	34	14.118	13.972	28.090
PULO BANDRING	2	36	931	23	12.249	11.858	24.107
RAHUNING	0	29	293	21	7.632	7.333	14.965
RAWANG PANCA ARGA	1	25	643	12	8.290	8.284	16.574
SEI DADAP	1	79	447	17	14.323	13.436	27.759
SEI KEPAYANG	0	42	246	28	7.300	7.257	14.557
SEI KEPAYANG BARAT	0	29	201	18	5.660	5.332	10.992
SEI KEPAYANG TIMUR	0	12	116	14	3.681	3.496	7.177
SETIA JANJI	0	42	159	4	5.351	5.195	10.546
SILAU LAUT	0	81	323	3	10.115	9.613	19.728
SIMPANG EMPAT	0	79	738	25	17.457	16.894	34.351
TANJUNG BALAI	0	46	558	24	16.217	14.985	31.202

Kecamatan	Umur Kurang dari 17 dan Menikah	Umur diatas 90 Tahun	Jumlah				Total
			Pemilih Pemula	Disabilitas	Pria	Wanita	
TELUK DALAM	0	36	309	10	8.249	7.853	16.102
TINGGI RAJA	0	22	629	17	8.763	8.516	17.279
<b>TOTAL</b>	12	1.251	14.728	513	301.511	293.933	595.444

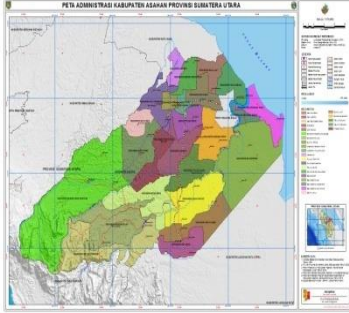
f. Sosialisasi KPU Asahan.

Untuk persiapan pemilukada serentak 2015 KPU asahan juga melakukan berbagai sosialisasi, dibawah ini adalah gambar sosialisasi pencalonan, calon Kepala Daerah Kabupaten Asahan.



## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum Daerah Penelitian



Kabupaten Asahan adalah sebuah kabupaten yang terletak di Sumatera Utara, Indonesia. Kabupaten ini beribukotakan Kisaran dan mempunyai wilayah seluas 3.675 km<sup>2</sup>. Penduduknya berjumlah 668.272 jiwa (Sensus 2010).

Secara astronomis Kabupaten

Asahan berada pada 2°03'- 3°26' Lintang Utara, 99°1'-100°0' Bujur Timur dengan ketinggian 0–1.000 meter di atas permukaan laut. Penduduk Kabupaten Asahan .

sebahagian besar bersuku Melayu 75% sering juga disebut Melayu Asahan atau Melayu Batubara. Asahan terdiri dari 100 kelurahan, 237 desa dan 25 kecamatan.

Dari segi letak geografis, di sebelah utara Kabupaten Asahan berbatasan dengan Kabupaten Batubara dan Selat Malaka, sebelah selatan Kabupaten Toba Samosir dan Kabupaten Labuhan batu Utara, sebelah barat Kabupaten Simalungun dan Kabupaten Batubara dan sebelah timur dan Selat Malaka.

Di pimpin oleh Drs. H. Taufan Gama Simatupang MAP dan Wakil Bupati nya adalah H. Surya, B,Sc. Kabupaten Asahan Konsentrasi pembangunan perekonomian Kabupaten Asahan pada tahun 2010 masih tetap mengarah kepada pembangunan pertanian, infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan bidang perekonomian lainnya. Jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2008, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Asahan pada tahun 2009 mengalami perlambatan. Perlambatan ini diakibatkan oleh adanya penurunan potensi produk komoditi unggulan pada beberapa sektor. Hal ini terjadi akibat adanya beberapa pergeseran alih fungsi lahan pertanian serta iklim cuaca yang kurang mendukung sehingga hasil yang dicapai tidak maksimal meskipun pemerintah telah melakukan regulasi terhadap kenaikan gaji pada sektor jasa-jasa dan buruh. Sedangkan sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Asahan pada tahun 2009 adalah sebesar 4,67% mengalami perlambatan sebesar 0,29% dari kondisi tahun 2008 sebesar 4,96%. Terjadinya perlambatan ini bukan hanya semata-mata diakibatkan oleh kebijakan pemerintah daerah. Namun juga dipengaruhi oleh kondisi perekonomian nasional dan regional dan bahkan internasional.

## B. Jumlah Penduduk

Penduduk sebagai subyek maupun objek pembangunan merupakan variabel dependen yang utama, karenanya informasi mengenai kependudukan menjadi sesuatu yang penting untuk dicermati. Sensus penduduk tahun 1971 yang mencatat pertumbuhan jumlah penduduk Kabupaten Asahan.

Tabel Jumlah DPT Pemilu Kab. Asahan 2014 Sumber KPU Asahan

No	Kecamatan	Jumlah DPT
1	Aek Kuasan	17.271 orang
2	Aek Ledong	13.502 orang
3	Aek Songsongan	12.607 orang
4	Air Batu	29.553 orang
5	Air Joman	32.424 orang
6	Bandar Pasir Mandoge	22.527 orang
7	Bandar Pulau	15.007 orang
8	Buntu Pane	16.408 orang
9	Kisaran Barat	39.953 orang
10	Kisaran Timur	51.292 orang
11	Meranti	15.195 orang
12	Pulau Rakyat	11.547 orang
13	Pulo Bandring	20.982 orang
14	Rahuning	12.272 orang

15	Rawang Panca Arga	13.636 orang
16	Sei Dadap	23.067 orang
17	Simpang Empat	28.185 orang
18	Sei Kepayang	12.174 orang
19	Sei Kepayang Barat	9.440 orang
20	Sei Kepayang Timur	6.342 orang
21	Tanjungbalai	24.314 orang
22	Setia Janji	9.089 orang
23	Silau Laut	15.361 orang
24	Teluk Dalam	12.267 orang
25	Tinggi Raja	13.477 orang
<b>JUMLAH</b>		

Pada pemilu 2014 Penyelenggara Pemilu Asahan sudah melakukan banyak pembenahan untuk persiapan Pemilu, persiapan yang sudah maksimal dengan matang, apakah jumlah DPT akan sejalan dengan persiapan dan meningkatnya jumlah DPT...!!??

Jumlah DPT yang memberikan hak suaranya pada Pemilihan Umum 2014 di kab. Asahan dan Persentase Tingkat Kehadiran Pemilih di TPS dalam Berbagai Pemilihan dimuat dalam table dibawah ini.

No.	Jenis Pemilu	Total
1.	Pileg 2009 (%)	77,92
2.	Pilpres 2009 (%)	76,21
3.	Pilbup 2010I (%)	76,83
4.	Pilbup 2010II (%)	74,49
5.	Pileg 2014 (%)	76,57
6.	Pilpres 2014 (%)	71,04
<b>Rata-rata (%)</b>		<b>75,51</b>

Untuk mengukur tingkat partisipasi dalam pemilu, tim menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan. Tinggi atau rendahnya tingkat partisipasi warga dalam pemilu, Partisipasi pemilih dalam pemilu harus segera diketahui untuk mencari akar permasalahan dan sekaligus solusinya, karena secara moralitas rendahnya partisipasi warga dalam pemilu adalah ketidak mampuan kita bersama untuk langsung berdiskusi dengan seluruh responden dari sisi agama untuk menjalin silaturahmi, dari sisi sosial memenuhi tanggung jawab insan akademisi dan dari sisi profesionalitas pekerjaan riset ini dilakukan untuk mencari akar masalah dalam pemilu di asahan.

Riset Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu dilakukan tim secara komperhensif dan mendalam dalam bentuk uraian kalimat yang sistematis Data dari Responden yang di kumpulkan diolah, dianalisis secara kuantitatif dengan teori yang digunakan. Berikut hasil riset tim di Berbagai Kecamatan di Asahan.

### **C. Partisipasi Masyarakat Dalam Politik**

Secara etimologis, patisipasi berasal dari bahasa latin *patisipare* yang berarti mengambil bagian atau turut serta. Sastrodipoetra dalam Saiful Arif (2012 : 45), menyatakan partisipasi sebagai *“keterlibatan yang bersifat spontan yang disertai kesadaran dan tanggungjawab terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan bersama”*. Sementara Rahnema (Saiful Arif, 2012 : 45) menyatakan patisipasi sebagai *“the action or fact or partaking, having or forming a part of”*.

Menurut Miriam Budiardjo (2013 : 367), partisipasi masyarakat dalam politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk turut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti: memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (*contacting*) atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan *direct actionnnya*, dan sebagainya.



Masyarakat merupakan faktor sentral dalam suatu negara demokrasi,. Tanpa adanya partisipasi masyarakat, demokrasi tidak akan dapat diwujudkan, karena hakekat demokrasi adalah dari, oleh dan untuk rakyat. Salah satu peranan masyarakat dalam negara demokrasi adalah partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Masyarakat sendiri yang menentukan eksekutif dan legislatif baik dipusat maupun daerah. Pemilu merupakan implementasi dari hak rakyat untuk secara politis dilibatkan, diikutsertakan secara langsung dalam menentukan arah dan kebijakan negara/daerah untuk lima tahun kedepan.

Partisipasi politik sebagai aktualisasi kedaulatan rakyat adalah suatu hal yang sangat fundamental dalam proses demokrasi, maknanya sangat penting bagi perkembangan kultur politik dan sistem demokrasi. Tingkat partisipasi politik masyarakat yang tinggi, akanberimbas positif terhadap proses pembangunan danselanjutnya hal ini akan menjadi stimulus yang signifikan bagi kemajuan bangsa dan negara.Namun demikian yang perlu kita garisbawahi adalah bahwa partisipasi politik yang bermakna positif seperti itu adalah partisipasi politik yang memenuhi syarat dari segi kualitatif maupun kuantitatif. Partisipasi politik yang kualitatif adalah partisipasi politik yang konstruktif dan mampu mendorong proses politik secara dewasa dan menjadi input yang baik bagi implementasi kebijakan penguasa. Sedangkan kuantitas partisipasi politik berkaitan dengan tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses politik dan dukungan terhadap implementasi kebijakan. Oleh karenanya tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum, termasuk Pemilihan Umum Kepala Daerah merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan, karena tinggi rendahnya partisipasi politik dapat mendeskripsikan tingkat demokratisasi dan merupakan pengejawantahan dari kedaulatan rakyat.

Partisipasi politik itu banyak ragam jenis dan implementasinya dan berkaitan erat dengan kesadaran politik. Partisipasi politk bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadik, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif. Partisipasi politik masyarakat didorong oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan yang dilakukan (misal pemberian suara), kepentingan

mereka akan dapat disalurkan atau sekurang-kurangnya diperhatikan dan mereka berkeyakinan bahwa tindakan mereka akan dapat mempengaruhi pemegang otoritas membuat keputusan yang memihak kepentingan mereka. Dengan kata lain, mereka percaya bahwa apa yang mereka lakukan akan mempunyai efek politik (*political effect*).

#### **D. Fenomena Golput Dalam Pemilu**

Keberhasilan pelaksanaan Pemilu ditentukan oleh banyak faktor. Salah satu faktor dominan yang mempengaruhi adalah pemilih. Meskipun dalam gelaran Pemilu semua warga negara yang memenuhi syarat diberikan hak pilih, namun tidak semua warga negara menggunakan hak pilihnya. Fenomena inilah yang disebut sebagai golput (golongan putih). Menurut Aspar dalam Gatut Saksono (2013 : 45), golput digunakan untuk merujuk kepada fenomena berikut : 1. Orang yang tidak menghadiri tempat pemungutan suara sebagai aksi protes, 2. Orang yang menghadiri tempat pemungutan suara tetapi tidak menggunakan hak pilihnya secara benar, dan 3. Orang yang menggunakan hak pilihnya namun dengan jalan menusuk bagian putih dari kartu suara.

Golput atau kekecewaan politik terjadi karena berbagai persoalan: (1). Kegagalan birokrasi memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, (2). Kekecewaan para elit (politik) terhadap situasi perpolitikan saat ini, (3). Adanya sikap apatis terhadap politik dari rakyat, dan (4). Rasionalitas rakyat terhadap politik semakin tinggi sehingga mereka kini akan berhitung tentang keuntungan riil yang didapat jika berafiliasi terhadap satu partai politik.

Eep Saefulloh Fatah, mengklasifikasikan golput atas empat golongan. *Pertama*, golput teknis, yakni mereka yang karena sebab-sebab teknis tertentu (seperti keluarga meninggal, ketiduran, dan lain-lain) berhalangan hadir ke tempat pemungutan suara, atau mereka yang keliru mencoblos sehingga suaranya dinyatakan tidak sah. *Kedua*, golput teknis-politis, seperti mereka yang tidak terdaftar sebagai pemilih karena kesalahan dirinya atau pihak lain (lembaga statistik, penyelenggara pemilu). *Ketiga*, golput politis, yakni mereka yang merasa tak punya pilihan dari kandidat yang tersedia atau tak percaya bahwa pileg/pilkada akan membawa perubahan dan perbaikan. *Keempat*, golput ideologis,

yakni mereka yang tak percaya pada mekanisme demokrasi (liberal) dan tak mau terlibat di dalamnya entah karena alasan fundamentalisme agama atau alasan politik-ideologi lain.

#### **E. Strategi Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat**

Peran masyarakat dalam Pemilu (Pileg, Pilpres, Pemilukada) merupakan faktor yang sangat penting, karena salah satu indikator keberhasilan Pemilu adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Pemilu merupakan mekanisme politik penting yang menandai implementasi kedaulatan rakyat. Negara yang berkedaulatan rakyat akan menggelar Pemilu sesuai ketentuan yang berlaku untuk melembagakan dan membumikan demokrasi. Pemilu digelar dengan mekanisme dan sistem yang menjamin adanya keadilan, kesamaan hak, transparansi, berkesinambungan dan akuntabilitas. Oleh karena itu, rakyat menjadi tertarik berpartisipasi dalam Pemilu. Negara yang seperti ini merupakan negara yang dikategorikan sebagai negara yang tingkat demokrasinya baik, namun sebaliknya apabila suatu negara tidak melaksanakan Pemilu atau tidak mampu melaksanakan Pemilu dengan baik, yaitu terjadi berbagai manipulasi, kecurangan, permainan kotor dan diskriminasi, maka negara itu dinilai sebagai negara yang anti demokrasi atau tingkat demokrasinya berkategori rendah.

Dalam rangka mewujudkan tingkat demokrasi yang tinggi, yaitu demokrasi yang didukung oleh partisipasi politik rakyat dapat ditempuh melalui strategi :

##### **1. Pendidikan Politik Rakyat**

Tugas untuk mendorong partisipasi politik masyarakat merupakan tugas bersama segenap suprastruktur dan infrastruktur politik. Namun sebenarnya, partai politik adalah pihak yang berkepentingan langsung dengan partisipasi masyarakat, karena masyarakat merupakan sumber dukungan suara bagi eksistensi partai. Untuk itu, upaya-upaya mendorong partisipasi masyarakat dalam Pemilu antara lain dapat ditempuh dengan peran partai politik untuk melakukan pendidikan politik rakyat. Dengan pendidikan politik yang sehat, bisa dipastikan semangat dan pemahaman

masyarakat terhadap partisipasi politik menjadi berkembang, seiring dengan perkembangan paradigma demokrasi yang sudah menjadi tuntutan jaman. Pada gilirannya akan tumbuh kesadaran sendiri untuk memilih partai karena kinerja serta keberpihakannya dalam momentum Pemilu.

Melalui pendidikan politik akan terjadi proses interaksi timbal balik antara partai dengan konstituen. Dengan demikian maka terjadi *transfer of knowledge*, yaitu masyarakat belajar untuk mengenal dan memahami mekanisme, sistem, struktur, cara kerja partai dan kedudukan partai dalam sistem ketatanegaraan. Pendidikan politik menjadikan masyarakat mengalami pencerahan, sehingga memahami tugas, kewajiban dan hak-haknya selaku warga negara. Rakyat adalah pemegang kedaulatan yang memiliki tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh komponen masyarakat serta untuk memilih wakil rakyat yang bertugas mengawasi jalannya pemerintahan. Pasal 31 UU Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan bahwa partai politik berkewajiban melakukan pendidikan politik bagi masyarakat sesuai ruang lingkup tanggung jawabnya dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender dan tujuannya antara lain: meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat, meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Atas dasar ini pendidikan politik rakyat adalah hal yang strategis untuk menimbulkan efek Pemilu yang lebih berkualitas. Pendidikan politik ini juga berpotensi untuk meningkatkan tingkat partisipasi politik rakyat, karena dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat.

## **2. Memaksimalkan Fungsi Partai Politik**

Miriam Budiardjo (2013 : 405 – 409), menyatakan bahwa partai politik memiliki fungsi:

a) Sarana Komunikasi Politik

Menurut Anwar Arifin (2011 : 1), komunikasi politik adalah pembicaraan untuk mempengaruhi dalam kehidupan bernegara. Komunikasi politik dapat juga merupakan seni mendesain apa yang mungkin (*art of possible*) dan bahkan dapat merupakan seni mendesain yang tidak mungkin (*art of impossible*). Sementara secara umum komunikasi politik dipahami sebagai proses penyampaian informasi politik dari partai/pemerintah kepada masyarakat dan sebaliknya dari masyarakat kepada pemerintah/partai. Sesuai fungsi agregasi yang melekat pada parpol, parpol berfungsi untuk menyerap, memilah-milah dan menghimpun aspirasi masyarakat untuk kemudian diartikulasikan/diperjuangkan lewat lembaga legislatif menjadi formulasi kebijakan yang melahirkan proyek/kegiatan yang dianggarkan oleh anggaran negara/daerah. Dalam upaya meningkatkan partisipasi politik, partai politik dapat memanfaatkan struktur partai untuk mensosialisasikan pemilihan umum dari tingkat pusat sampai tingkat desa.

b) Sosialisasi Politik (*Political Socialization*)

Adalah suatu proses yang melaluinya seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang umumnya sedang berlaku di mana ia berada. Ia adalah bagian dari proses yang menentukan sikap politik seseorang, misalnya mengenai nasionalisme, kelas sosial, suku bangsa, ideologi, hak dan kewajiban. Dimensi lain dari sosialisasi politik adalah sebagai proses yang melaluinya masyarakat menyampaikan "budaya politik" yaitu norma-norma dan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan demikian sosialisasi politik merupakan faktor penting dalam terbentuknya budaya politik (*political culture*) suatu bangsa. Proses sosialisasi berjalan seumur hidup, terutama dalam masa kanak-kanak. Ia berkembang melalui keluarga, sekolah, *peer group*, tempat

kerja, pengalaman sebagai orang dewasa, organisasi keagamaan dan partai politik, ia juga menjadi penghubung yang mensosialisasikan nilai-nilai politik generasi yang satu ke generasi yang lain. Pelaksanaan sosialisasi politik dilakukan melalui berbagai cara yaitu media massa, ceramah-ceramah, penerangan, kursus kader, penataran dan sebagainya. Sosialisasi politik dilakukan oleh parpol kepada masyarakat berupa pengenalan program-program dari partai tersebut. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat memilih parpol tersebut pada pemilihan umum. Ide, visi dan kebijakan strategis yang menjadi pilihan partai politik dimasyarakatkan kepada konstituen untuk mendapatkan '*feedback*' berupa dukungan dari masyarakat luas. Partai menjadi strukturantara atau '*intermediate structure*' yang harus memainkan peran dalam membumikan cita-cita kenegaraan dalam kesadaran kolektif masyarakat warga negara.

c) Sarana Rekrutmen Politik (*Political Recruitment*)

Fungsi ini berkaitan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. Untuk kepentingan internalnya, setiap partai butuh kader-kader yang berkualitas, karena hanya dengan kader yang demikian ia dapat menjadi partai yang mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengembangkan diri. Dengan mempunyai kader-kader yang baik, partai tidak akan sulit menemukan pemimpinnya sendiri dan mempunyai peluang untuk mengajukan calon untuk masuk ke bursa kepemimpinan nasional. Rekrutmen politik gunanya untuk mencari orang yang berbakat atupun berkompeten untuk aktif dalam kegiatan politik. Partai dibentuk memang dimaksudkan untuk menjadi kendaraan yang sah untuk menyeleksi kader-kader pemimpin negara pada jenjang-jenjang dan posisi-posisi tertentu. Kader-kader itu ada yang dipilih secara langsung oleh rakyat, ada pula yang dipilih melalui cara yang tidak langsung, seperti oleh Dewan Perwakilan Rakyat,

ataupun melalui cara-cara yang tidak langsung lainnya. Oleh karena itu partai politik dalam penetapan kader yang diusung dalam penempatan jabatan ataupun mencalonkan kandidatnya baik dalam Pileg, Pilbup, Pilgub ataupun Pilpres harus memperhatikan aspirasi yang berkembang dimasyarakat agar sosialisasi politik mendorong pula terhadap meningkatnya partisipasi masyarakat dalam memilih baik secara individu maupun secara kelompok.

d) Pengatur Konflik (*Conflict Management*)

Potensi konflik selalu ada di setiap masyarakat, apalagi di masyarakat yang heterogen, apakah dari segi etnis (suku bangsa), sosial-ekonomi, ataupun agama. Setiap perbedaan tersebut menyimpan konflik. Apabila kenakeragaman itu terjadi di negara yang menganut paham demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat dianggap hal yang wajar dan mendapat tempat. Akan tetapi di dalam negara yang heterogen sifatnya, potensi pertentangan lebih besar dan dengan mudah mengundang konflik. Di sini peran partai diperlukan untuk mengatasinya, atau sekurang-kurangnya dapat diatur sedemikian rupa sehingga akibat negatifnya dapat ditekan seminimal mungkin. Elite partai dapat menumbuhkan pengertian di antara mereka dan bersamaan dengan itu juga meyakinkan pendukungnya.

**3. Memaksimalkan Sosialisasi oleh Penyelenggara Pemilu**

Sosialisasi Pemilu merupakan hal yang strategis sekali untuk terus ditingkatkan. Perlu terus diupayakan langkah-langkah kongkrit untuk membumikan demokrasi melalui sosialisasi yang intensif dan berkesinambungan. Dengan demikian diharapkan pemahaman tentang pentingnya Pemilu dalam sebuah negara yang demokratis, akan menjadi *mindset* publik dan selanjutnya ada harapan bahwa kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi politik semakin meningkat.

Penyelenggara Pemilu diharapkan dapat melaksanakan sosialisasi yang dapat menyentuh seluruh elemen masyarakat, sehingga dapat

mewujudkan kesadaran kolektif masyarakat tentang Pemilu. Ketika tercapai kesadaran kolektif terhadap Pemilu, penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas akan semakin mudah diwujudkan. Pemilu yang berkualitas menjadi dambaan setiap bangsa yang demokratis, karena memuaskan dan dapat memenuhi harapan publik dan merupakan faktor pendorong yang kuat menuju pencapaian tujuan nasional secara elegan.

Harapannya sosialisasi yang dilakukan tidak terbatas pada teknis penyelenggaraan Pemilu, namun filosofi dan segala hal yang melatarbelakangi penyelenggaraan Pemilu perlu untuk dilakukan. Hal ini menjadi penting karena penanaman pemahaman terkait dengan filosofi dan esensi demokrasi merupakan kunci yang dapat mengerakkan semangat masyarakat untuk terus menjaga demokrasi dan penyelenggaraan Pemilu di Negara ini.

## **F. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Dalam Pemilu di Kabupaten**

### **Asahan**

Tidak seperti pada pemilihan umum pada masa orde baru dimana partisipasi pemilih tetap stabil di atas angka 90%, terlepas apakah ada intimidasi atau tidak oleh pemerintah pada waktu itu. Pemilihan umum yang dilaksanakan di kabupaten Asahan semenjak semenjak tahun 2009 memiliki fluktuasi yang disebabkan oleh berbagai macam factor. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih untuk hadir di TPS untuk menggunakan hak pilihnya yaitu antara lain:

Ada beberapa factor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi Pemilih dalam pemilu Kabupaten Asahan 2014. tyang disampaikan oleh respondens, persoalan terkait dengan partisipasi dalam pemilu diantaranya adalah fluktuasi kehadiran pemilih ke TPS, suara tidak sah yang tinggi, gejala politik uang, misteri derajat melek politik warga, dan langkahnya kesukarelaan politik, akan menjadi pertanyaan dalam kuisisioner.

#### **1. Faktor Ekonomi**



Factor ekonomi yang paling berpengaruh terhadap tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu bisa mempengaruhi partisipasi dalam pemilu Tingkat partisipasi pemilih.

Hasil riset dari responden :

Di kecamatan Aek Songsongan dan Kecamatan Bandar Pulau karna umumnya warga di 2 kecamatan tersebut hidup dengan ekonomi lebih membuat kebanyakan dari mereka tidak dapat pergi ke TPS karena sudah diladang.

Di Kecamatan Tanjung Balai dan Sei Kepayang, umumnya mata pencaharian mereka sebagai nelayan, memaksa mereka tidak dapat memberikan hak suaranya dalam pemilu, karena harus sudah berangkat ke laut saat subuh, dan baru kembali setelah 3 – 7 hari ditengah laut.

## **2. Faktor Kebosanan**

Fak ini menjadi faktor terbanyak yang disampaikan oleh respondens, persoalan terkait dengan partisipasi dalam pemilu diantaranya adalah fluktuasi kehadiran pemilih ke TPS, suara tidak sah yang tinggi, gejala politik uang, misteri derajat melek politik warga, dan langkahnya kesukarelaan politik, akan menjadi pertanyaan dalam kuisisioner.

## **3. Jenis pemilihan umum**

Factor ini sangat berdampak terhadap tingkat partisipasi pemilih yang datang ke lokasi TPS untuk memberikan hak pilihnya. Hal ini terlihat dari perbandingan jumlah pemilih yang menggunakan hak suara pada pemilihan umum legislatif cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden atau pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Pileg seperti yang dijelaskan dalam data di bawah ini.

- a. Pemilihan legislatif dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asahan memiliki tingkat partisipasi tertinggi dalam sejarah pemilu di asahan.

Karena warga merasa pemilu legislatif dan kepala daerah adalah pemilihan yang begitu berpengaruh dalam menentukan kebijakan di daerahnya, dan yang mencalon mempunyai hubungan emosional yang dekat dengan warga dalam bentuk saudara, tetangga, adat, suku dll.

Keterangan responden dari Kecamatan Kisaran barat, timur, tanjung balai, sei kepayang, dan Bandar pulau.

#### 4. Factor tingginya Pelanggaran Pemilu

Many politik membuat warga (DPT) berkurang dan bertambah dalam pemilu, karena kebanyakan warga mengatakan mereka menunggu tim sukses dari calon, memberikan uang sebagai alat pengganti untuk membayar hak suaranya.

#### 5. Faktor Kelalaian

Tidak menutup kemungkinan bisa terjadi dari beberapa responden beralasan tidak dapat memilih karena belum terdaptar di TPS.

Dengan data di atas kita bisa melihat bahwa trend partisipasi pemilih dengan kehadiran di lokasi TPS untuk menggunakan hak pilihnya terlihat bahwa pada pemilihan umum legislatif tingkat kehadiran pemilih di lokasi TPS untuk menggunakan hak pilihnya cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan pemilihan umum yang lain seperti pilpres dan pemilihan kepala daerah. Hal ini disebabkan karena pada pemilihan umum legislatif akan memilih calon-calon perwakilan atau calon pemimpin yang paling dekat.

Pemilihan legilatif terutama pemilihan anggota DPRD Kabupaten hampir setiap kampung ada calonnya. Hal inilah yang menyebabkan mobilisasi pemilih antusias untuk datang ke lokasi pemilih. Berbeda dengan pemilihan kepada daerah atau pemilihan presiden dan wakil presiden di mana tokoh yang akan dipilih relatif jauh dari masyarakat *grass root*. Sehingga menjadi pemicu rendahnya tingkat kehadiran pemilih di lokasi TPS untuk memberikan hak pilihnya.

#### G. Dokumentasi Tim Riset





## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **Kesimpulan**

Ciri utama dari suatu negara yang mempraktekkan demokrasi adalah dilaksanakannya Pemilihan Umum (Pemilu) secara periodik dalam tenggang waktu tertentu. Dikatakan sebagai indikator utama negara demokrasi, karena dalam Pemilu rakyat menggunakan suaranya, melaksanakan hak politiknya dan menentukan pilihannya secara langsung dan bebas.

Masyarakat merupakan faktor sentral dalam suatu negara demokrasi,. Tanpa adanya partisipasi masyarakat, demokrasi tidak akan dapat diwujudkan, karena hakekat demokrasi adalah dari, oleh dan untuk rakyat. Salah satu peranan masyarakat dalam negara demokrasi adalah partisipasi masyarakat dalam Pemilu.

Strategi untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat dapat dilakukan melalui :

1. Pendidikan politik
2. Memaksimalkan fungsi partai politik
3. Memaksimalkan sosialisasi oleh penyelenggaran pemilu

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa :

1. Tingkat kehadiran pemilih dalam pemilihan umum tahun 2014 di Asahan Tengah menunjukkan trend yang fluktuatif hal ini dibuktikan dengan pada pemilihan umum legislatif tahun 2014 memiliki tingkat partisipasi yang lebih tinggi dibandingkan pemilihan umum sebelumnya yaitu pada pemilihan legislatif pada Tahun 2009. Akan tetapi tingkat kehadiran pemilih memiliki tingkat penurunan yang signifikan pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kehadiran pemilih di lokasi TPS di Kabupaten Asahan yaitu pertama, jenis pemilihan umum. Secara umum tingkat partisipasi pemilih yang hadir untuk memberikan hak pilihnya pada pemilihan umum

legislatif cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden atau pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Hal ini disebabkan karena pemilihan legislatif sangat dekat dengan warganya karena hampir setiap Desa punya calon masing-masing sehingga inilah yang meningkatkan animo masyarakat untuk memilih, karena masyarakat memiliki kedekatan dengan tokoh-tokoh yang akan dipilih. Bisa dilihat dalam pemilihan umum legislatif tahun 2014.

### **Saran**

Keseriusan penyelenggara pemilu bukan hanya dari perisapan logistik saja tapi kerjasama dengan peserta dan masyarakat akan lebih berguna untuk partisipasi dalam pemilu

Lampiran :

### KUESIONER

#### **Petunjuk Pengisian**

1. Kuesioner ini semata-mata untuk keperluan akademis, mohon dijawab dengan jujur.
2. Bacalah dan jawablah semua pertanyaan dengan teliti tanpa ada yang terlewatkan.
3. Berilah tanda (O/ Lingkaran) pada jawaban yang menurut anda tepat.

#### **Data Responden**

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Nama	
2.	Usia	
3.	Jenis Kelamin	a. Laki – Laki b. Perempuan
4.	Alamat a. Jalan b. Kelurahan c. Kecamatan	
5.	Etnis/ Suku	a. Batak b. Melayu c. Jawa d. DII
6.	Agama	a. Islam b. Kristen Katolik c. Kristen Protestan d. Hindu e. Budha f. DII
7.	Pendidikan	a. Tidak Punya Tamatan b. Tamat SD c. Tamat SMP d. Tamat SMA e. S1 f. S2 g. S3
8.	Pekerjaan	a. Pegawai Negeri b. Pegawai Swasta c. Wiraswata d. DII
9.	Apakah anda telah terdaftar sebagai pemilih pada pemilihan umum yang lalu?	a. Terdaftar b. Tidak terdaftar
10.	Apakah anda ikut memilih pada pemilihan umum yang lalu?	a. Ikut memilih b. Tidak ikut memilih
11.	Mengapa anda tidak menggunakan hak pilih anda dalam Pemilu ?	a. Tidak Punya Kartu Pemilih b. Tidak tahu kalau namanya terdaftar sebagai pemilih c. Sebagai protes karena pelaksanaan

		<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemilu</li> <li>d. Bingung memilih calon</li> <li>e. Tidak ada calon favorit</li> <li>f. Tidak Percaya Pemilu bisa memperbaiki keadaan</li> <li>g. Harus Bekerja</li> <li>h. Hari ini ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan</li> <li>i. Tidak Tahu</li> </ul>
12.	Apakah menurut Bapak/Ibu Pemilu merupakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Hak dari Warga Negara</li> <li>b. Kewajiban Warga Negara</li> </ul>
13.	Apakah anda memiliki harapan-harapan akan perubahan terhadap pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memiliki harapan yang tinggi</li> <li>b. Memiliki harapan yang rendah</li> <li>c. Tidak berharap sama sekali</li> </ul>
14.	Apakah anda mempercayai dan merasa perlu untuk mengikuti Pemilu?	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sangat perlu</li> <li>b. Tidak perlu</li> <li>c. Tidak peduli</li> </ul>
15.	Apakah visi dan misi yang diberikan oleh masing-masing partai politik mempengaruhi anda untuk tidak memilih?	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sangat mempengaruhi</li> <li>b. Mempengaruhi</li> <li>c. Tidak mempengaruhi</li> </ul>
16.	Apakah anda merasa partai politik dalam Pemilu sudah memperjuangkan kepentingan anda?	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ya</li> <li>b. Tidak</li> <li>c. Tidak tahu</li> </ul>
17.	Apakah partai politik dalam Pemilu Legislatif sudah melakukan sosialisasi politik kepada masyarakat?	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ya</li> <li>b. Tidak</li> <li>c. Tidak tahu</li> </ul>
18.	Apakah partai politik sudah melakukan rekrutmen politik untuk dijadikan caleg yang diinginkan masyarakat?	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sudah</li> <li>b. Tidak</li> <li>c. Tidak tahu</li> </ul>
19.	Apakah partai politik dalam peserta Pemilu sudah melakukan komunikasi politik yang baik kepada masyarakat?	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sudah</li> <li>b. Tidak</li> <li>c. Tidak tahu</li> </ul>
20.	Apakah isu agama dari partai politik mempunyai pengaruh kepada anda untuk tidak ikut memilih?	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sangat mempengaruhi</li> <li>b. Mempengaruhi</li> <li>c. Tidak mempengaruhi</li> </ul>
20.	Apakah isu ekonomi dari partai politik mempunyai pengaruh kepada anda untuk tidak ikut memilih?	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sangat mempengaruhi</li> <li>b. Mempengaruhi</li> <li>c. Tidak mempengaruhi</li> </ul>
21.	Apakah pihak keluarga anda memberikan pengaruh kepada anda dalam hal tidak ikut memilih pada pemilu yang lalu?	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ya</li> <li>b. Tidak</li> <li>c. Tidak tahu</li> </ul>
22.	Bagaimana respon anda terhadap calon yang memberikan uang/bantuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Anda akan memilihnya</li> <li>b. Tidak memilihnya</li> <li>c. Ambil uangnya, pilihannya bebas</li> </ul>

23.	Kriteria apa yang anda butuhkan untuk pemimpin baru Asahan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bijaksana, mandiri, pintar, bersosial, kaya, sehat, taat beragama</li> <li>b. Berpengalaman di organisasi, pintar, bersahabat, suka jajan, memiliki title, sehat, bijak, taat agama</li> <li>c. Tampan, kaya, sehat, pintar</li> </ul>
24.	Apa pendapat anda mengenai pemilukada dari tahun 2004 dan 2009	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Buruk</li> <li>b. Baik</li> <li>c. Sangat baik</li> </ul>
25.	Apa harapan anda dalam pemilukada tahun ini	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Transparansi, jujur dan adil</li> <li>b. Bersih, tertutup dan rahasia.</li> </ul>

No.	Kritik dan Saran untuk Penyelenggara Pemilu	
	Komisi Pemilihan Umum	Panitia Pengawas Pemilu

Kami ucapkan terimakasih kepada saudara yang telah bersedia menjawab kuisisioner Partisipasi Dalam Pemilu.

Asahan, Juni 2015  
 Nama responden

( \_\_\_\_\_ )



## DAFTAR PUSTAKA

Anwar Arifin, *Komunikasi Politik, Filsafat-Paradigma-Teori-Tujuan-Strategi dan Komunikasi Politik Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011

Ign. Gatut Saksono, *Golput dan Masa Depan Bangsa*, Elmatara, Yogyakarta, 2013.

Miriam Budiardjo, *Dasar - dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, Cetakan Kesembilan, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013

Saiful Arif, *Partisipasi, Demokrasi dan Pembangunan dalam Partisipasi Warga Dalam Pembangunan dan Demokrasi*, Program Sekolah Demokrasi bekerjasama dengan Averoes Press, Malang, 2012

<http://febrisartika257.wordpress.com/tugas-media/internet-dan-web-desain/artikel-makalah/partisipasi-masyarakat-dalam-politik-sebagai-implementasi-nilai-nilai-demokrasi-di-indoneisa/>

Kusumastanto, T. 2003. *Ocean Policy dalam Politik Membangun Negeri di Era Otonomi Daerah*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Kusumastanto, T. 2006. *Pengaruh Kebijakan Politik PKSPL-IPB Press*. Bogor

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilu kada Oleh : Dra. Hj. Lena Farida, M.Si

Strategi Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilu Oleh : Drs. Irawan Rumecko, Mm Widyaiswara Badan Diklat Jakarta

Media online Merdeka.Com diakses pada tanggal, 21 Juli 2015

Media online Andalas.com diakses pada tanggal, 21 Juli 2015

Media online KOMPAS.Com diakses pada tanggal, 21 Juli 2015

Media online Suara Indonesia-News.Com diakses pada tanggal, 21 Juli 2015

Media online Medanbisnis diakses pada tanggal, 21 Juli 2015

Media online Sumutdaily.Com Jakarta diakses pada tanggal, 21 Juli 2015

